

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin Di Jawa Timur

Slamet Hari Sutanto^a, Sri Wahyuningsih^b, Dendy Setyawan^c

^{abc}Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

e-mail :slametharisutanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai, faktor penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan program yang lebih efektif. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan non tunai seperti kesiapan sarana dan prasarana, distribusi dan sebaran e-Warong belum merata, ketersediaan komoditas pangan di e-Warong, serta proses transaksi di e-Warong yang perlu diperhatikan seperti penyetokan komoditas pangan, termasuk kesiapan SDM pelaksanaannya. Secara umum penyaluran program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai pada Lokasi penelitian sudah cukup efektif, sehingga aspek 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi sudah tercapai. Program ini juga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan, rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain memperbaiki dan meningkatkan jenis dan kualitas komoditas pangan yang disalurkan, kemudian menyusun dan mengkaji kembali jumlah dan persebaran e-Warong, dengan demikian manfaat dari program ini dapat dirasakan sekaligus meningkatkan kepuasan kepada keluarga penerima program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai ini.

kata kunci: program bantuan pangan non tunai; efektifitas kebijakan; keluarga miskin

Effectiveness Of Implementation Of Non-Cash Food Social Assistance Program For Fulfillment Of The Main Needs Of Poor Family In East Java

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Social Assistance program, the inhibiting factors for its implementation, and to formulate a more effective program implementation policy strategy. Methods This research uses a qualitative descriptive approach, with research locations in Bojonegoro and Lamongan districts. The results show that there are still obstacles in the process of distributing non-cash food social assistance such as the readiness of facilities and infrastructure, the distribution and distribution of e-Warong is not evenly distributed, the availability of food commodities at e-Warong, and transaction processes at e-Warong that need attention such as stocking commodities. food, including the readiness of implementing human resources. In general, the distribution of the Non-Cash Food Social Assistance program at the research sites has been quite effective, so that the 6T aspects, namely right target, right quantity, right time, right price, right quality, and right administration have been achieved. This program is also able to reduce the burden of spending on target households in meeting food needs, recommendations that can be proposed include improving and increasing the type and quality of food commodities distributed, then compiling and reviewing the number and distribution of e-Warong, thereby benefiting from this program. can be felt as well as increase satisfaction with the families of recipients of this Non-Cash Food Social Assistance program.

Keywords: non-cash food aid program; policy effectiveness; poor family

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan dan kerentanan pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, sehingga memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas 2017). Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus, antara lain penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra, yang sebelumnya disebut Raskin) dan penataan basis data kemiskinan.

Kebijakan Program Beras Rastra kemudian bertransformasi dari pola subsidi beras menjadi pola bantuan sosial (bansos) pangan. Bansos pangan disalurkan dalam bentuk natura (beras) dan dalam bentuk nontunai. Bansos pangan dalam bentuk natura disebut sebagai Bansos Rastra, sedangkan bansos pangan dalam bentuk nontunai disebut sebagai Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kebijakan ini merupakan implementasi Perpres RI No.63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dilaksanakan dan diperluas bertahap mulai 2017 (Kemensos, 2017).

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berbeda dengan Rastra, program ini dianggap jauh lebih menguntungkan bagi KPM karena penerima Rastra hanya memiliki keterbatasan pilihan bantuan, sedangkan melalui BPNT setiap KPM dapat mengalokasikannya tidak hanya untuk beras saja, melainkan juga untuk kebutuhan pangan lain, seperti telur misalnya di elektronik warung gotong royong (e-Warong), dan bebas memilih jenis dan kualitas barang, melalui BPNT penerima bantuan juga bisa mengalokasikan dana tersebut ke pendidikan atau hal lain yang dianggap juga diperlukan.

Tujuan program Rastra dan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), disamping itu dengan model non tunai dapat mendukung perilaku produktif serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan (Ishak dkk 2019).

Sasaran program Rastra dan BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota, dan termasuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Di Jawa Timur pada tahun 2019 jumlah KPM 1.666.284. Daftar KPM Rastra dan BPNT tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana program bantuan sosial lain, Bantuan Sosial Pangan Program Sembako yang diberikan secara non tunai ini dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, masih ada penerima manfaat yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik padahal banyak warga lainnya yang lebih layak menjadi penerima (Rezqyana, 2019), sering terjadi kurangnya koordinasi perihal penunjukan KPM, data yang diserahkan kepala desa kepada dinas sosial banyak yang tidak "up to date". Ketidak-kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet dan lain sebagainya, belum lagi masih terdapat permasalahan terkait pemanfaatan dana bantuan yang tidak sebagaimana mestinya dengan aturan yang telah ditetapkan (Rachman 2018).

Pelaksanaan BPNT ini tentu tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Program Rastra, karena Program Rastra merupakan keberlanjutan dari Program Raskin yang sudah 16 (enam belas) tahun berjalan, sementara BPNT adalah program yang baru saja dilaksanakan, oleh sebab itu, penelitian ini hanya akan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), serta apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dari september 2019, dengan menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur. Berbekal informasi terkait efektivitas pelaksanaan BPNT pada kedua lokasi tersebut, dapat dianalisis dan dirumuskan strategi pelaksanaan program BPNT yang lebih baik.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Pelaksanaan BPNT dimulai dengan kegiatan penyiapan data KPM melalui aplikasi SIKS-NG KPM dimana penerima manfaat KPM PKH diutamakan berasal dari penerima manfaat BPNT. (Kemensos, 2020). Hal ini merupakan kebijakan Kementerian Sosial yang menargetkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat dapat mencapai 15 juta KPM, sedangkan jumlah KPM PKH di seluruh Indonesia masih berkisar 10 juta KPM, sehingga sisa KPM sebesar 5 juta KPM, diambilkan dari penerima BPNT (Kemensos, 2020).

Pada dasarnya KPM penerima program BPNT merupakan peralihan dari program Rastra yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian pada masing-masing Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, kurang lebih antara 33-40% KPM yang menerima BPNT adalah juga penerima bantuan PKH. Sementara sisanya adalah bukan penerima bantuan PKH, yaitu KPM setiap bulannya melalui Kartu Kombo KKS sebagai alat transaksi

untuk mencairkan komoditas pangan berupa beras dan atau telur yang kemudian dicairkan melalui e-Warong.

Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Penilaian Aspek Ketepatan Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan data sasaran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan sudah semakin berkurang. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada awal program seperti data ganda, meninggal atau data tidak ditemukan hampir tidak pernah terjadi.

Secara umum berdasarkan tanggapan masyarakat maupun pelaksana kebijakan baik di tingkat desa maupun kecamatan terhadap penentuan KPM sasaran penerima bantuan BPNT, menyatakan bahwa proses penentuan KPM sudah tepat sasaran, hanya sebagian kecil yang menilai kurang tepat. Hal ini disebabkan penentuan KPM telah dibahas melalui kegiatan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT, kader dan KPM penerima manfaat program itu sendiri. Dengan demikian dari aspek akuntabilitas masyarakat semakin mengetahui dengan pasti bahwa proses penentuan KPM telah melalui mekanisme yang terbuka dan akurat sesuai kriteria.

Karakteristik KPM BPNT dilihat dari usia penerima manfaat, diketahui ada yang masih berada dalam kelompok usia produktif, dengan rata-rata umur KPM antara 45-53 tahun. Ini artinya ada kepala keluarga yang masih produktif namun masih mendapatkan bantuan program. Lebih lanjut dilihat dari jenis pekerjaan utama KPM, terkonsentrasi pada buruh tani, usaha non pertanian dan berdagang atau usaha jasa. Hal ini wajar karena mayoritas penduduk pedesaan yang mendapatkan program bantuan sebagian besar merupakan masyarakat yang tidak

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

memiliki lahan pertanian sehingga lebih menggantungkan hidupnya bekerja di lahan pertanian milik orang lain (buruh kerja) dan atau berdagang.

Penilaian Aspek Ketepatan Administrasi

Dari aspek ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan penentuan KPM sudah tepat. Penerima sasaran pada BPNT KPM yang berasal dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam BPNT pada 2 (dua) lokasi penelitian oleh Dinas Sosial telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi yang baik.

Proses monitoring evaluasi dilakukan untuk meningkatkan ketepatan administrasi dan agar pelaksanaan program tepat waktu, Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan sendiri beserta jajaran pemerintah lainnya selalu melakukan rapat pelaksanaan minimal setiap sebulan sekali sebelum tanggal pencairan, kegiatan koordinasi ini juga secara rutin dilakukan dengan para pihak pelaksana di lapangan yaitu aparatur di tingkat desa/kelurahan, Bank, pendamping program, serta agen penyalur e-Warong.

Penilaian Aspek Ketepatan Waktu

Dari aspek Ketepatan waktu hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pencairan BPNT di kedua lokasi penelitian sudah tepat waktu dimana setiap bulannya dana yang disalurkan oleh bank penyalur mulai tanggal 10 sampai akhir bulan pada bulan berjalan, sehingga sudah sesuai aturan Permensos Nomor 20 tahun 2020 dan Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020, yaitu bantuan diberikan antara tanggal 10 atau paling lambat tgl 30 setiap bulan.

Pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran program BPNT ini dilakukan pada setiap tanggal 25 namun terjadi perubahan pada pertengahan tahun 2019. Perubahan ini terjadi karena pada tanggal 25 atau tanggal diakhir

bulan bank penyalur banyak melakukan transaksi yang lain sehingga agar penyaluran program BPNT atau Rastra ini efektif maka pencairan dirubah menjadi tanggal 10 setiap bulannya, apabila mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena pada tanggal penyaluran bank penyalur sedang libur atau hari raya, maka solusinya ada penyaluran akan disalurkan sebelum tanggal atau tiga hari sebelum penyaluran.

Penilaian Ketepatan Kualitas, Jumlah dan Harga

Terkait penilaian ketepatan, kualitas, jumlah dan harga komoditas pangan yang diberikan terutama beras dan telur sebagian besar KPM menilai sudah cukup bagus dan wajar. Pada Program BPNT ini KPM diberikan kartu elektronik berbasis e-wallet yang dapat dipakai untuk membeli komoditas pangan yang dibutuhkan di e-Warong yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, dengan demikian tidak ada perbedaan harga maupun jumlah, sebab KPM penerima manfaat dapat membeli komoditas pangan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah dan harga yang berlaku. Meski demikian para pendamping TSKS maupun petugas Kecamatan, Desa maupun dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota tetap harus mengontrol kualitas komoditas pangan yang disalurkan.

Jumlah beras yang diterima KPM di Kabupaten Bojonegoro ini kurang lebih sebesar 15 kg/bulan kualitas medium, 1 kg Telur, ½ Kg daging ayam, buah dan tempe sebagai sumber protein. Berdasarkan informasi bahan pokok beras, telur dan daging ayam di supply dari distributor pada masing-masing kecamatan dan dipantau kualitasnya oleh Dinas Sosial Kabupaten setiap bulan, sedangkan tempe di suplai oleh para perajin tempe desa yang terdekat dengan e-Warong.

Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan diberikan dalam bentuk beras dengan kualitas medium, telur, bawang merah kacang hijau yang berganti ganti dengan kacang tanah, dan buah-buahan, meskipun jenis dan komoditas pangan yang diberikan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

dalam BSP Program Sembako ini bervariasi antar wilayah, tetapi masih tidak keluar dari ketentuan dan item yang dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020.

Selama penelitian berlangsung dan berdasarkan informasi dari KPM ketika diminta tanggapan mengenai kualitas bantuan pangan dalam BPNT belum ada atau tidak terjadi bantuan pangan yang kualitasnya di bawah standar, dimana belum ada pengaduan dari KPM, ketika bahan pangan kualitasnya jelek atau dibawah standar yang ditetapkan, kejadian berat timbangannya kurang juga jarang terjadi.

Penilaian KPM terhadap Program BPNT ini dapat membantu rata-rata belanja kebutuhan pokok harian selama 10-15 hari, dengan demikian BPNT mampu mengurangi beban pengeluaran dan mengatasi beban pengeluaran kebutuhan makanan sehari-hari melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik konsumsi beras bagi setiap orang rata-rata setiap tahun sebesar 128 kg/orang/tahun, maka setiap bulan diperlukan kurang lebih 42,8 kg untuk setiap KPM dengan 4 anggota keluarga. Dari perhitungan tersebut dan terbatasnya anggaran negara, maka jumlah yang rasional beras pada program Bantuan Pangan setiap bulan adalah 50 persen dari kebutuhan yaitu sebesar 20 kg/KPM (Sudiarso 2012).

Rincian komoditas pangan yang diberikan pada tahun 2020 memang berbeda dengan tahun yang lalu yaitu mengalami penambahan jenis komoditas pangan. Jenis komoditas pangan yang ditambahkan dalam daftar oleh Kemensos adalah sumber karbohidrat berupa beras atau bahan lokal lain seperti jagung dan sagu. Sedangkan sumber protein hewani berupa telur, ayam dan ikan segar. Sumber protein nabati tersebut berupa kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu, ada pula sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan yang merupakan pengembangan dari jenis komoditas pangan yang dapat dibeli oleh KPM.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Masih banyak penghambat dalam pelaksanaan Program BPNT ini, salah satu nya adalah kurangnya pengetahuan dan sikap KPM terhadap transaksi non tunai. KPM belum memahami dengan baik transaksi perbankan, masih ada yang belum bisa menggunakan mesin EDC (*Elektronik Data Capture*), begitupun pengelola e-Warong Kube PKH. Masih banyak KPM menuliskan nomor PIN di balik kartu KKS sebagai pengingat agar tidak lupa PIN. Kondisi ini berbahaya dari sisi kerahasiaan sehingga memberi kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya.

Kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan BPNT yang dihadapi oleh pengelola e-Warong yaitu mesin EDC rusak, macet atau jaringan internet bermasalah, meski sudah jarang terjadi kendala teknis seperti ini akan berakibat pada terganggunya transaksi sehingga menimbulkan antrian KPM saat pencairan bantuan, sedangkan aspek aksesibilitas atau kemudahan dimana artinya KPM dapat melakukan transaksi yang dekat dengan tempat tinggalnya terlihat belum optimal dimana jumlah dan sebaran e-Warong pada kedua lokasi penelitian masih belum merata.

Padahal sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2020, rasio jumlah e-Warong dengan jumlah KPM yang disyaratkan adalah 1:250 artinya 1 e-Warong hanya dapat melayani minimal 250 KPM, sehingga setiap daerah kelurahan atau desa minimal harus terdapat 1 e-Warong. Pada saat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, data yang ada satu agen atau e-Warong melayani hampir 250-400 KPM, bahkan di Kecamatan kepohbaru yang memiliki 25 Desa baru memiliki 17 agen atau e-Warong.

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Lamongan dimana jumlah e-Warong juga masih terbatas, data Dinas Sosial Kabupaten Lamongan baru ada 390 buah e-Warong yang melayani 474 Desa, bahkan pada desa-desa

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

tertentu bisa terdapat 2 hingga 3 e-Warong, tetapi di beberapa desa lainnya, sama sekali tidak terdapat e-Warong, sehingga perlu disusun kembali dan mengkaji persebaran e-Warong, mengingat kondisi geografis yang berbeda. Bahkan sebagian wilayah penelitian masih terdapat e-Warong belum layak tetapi dipaksakan menjadi e-Warong, bahkan masih ada perangkat desa ataupun kepala desa dan keluarganya yang menjadi agen/e-Warong.

Strategi Kebijakan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang Efektif

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPNT pada lokasi penelitian sudah efektif dan tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya ketahanan pangan dan memberikan gizi seimbang kepada KPM. Sebagian besar KPM puas, karena dengan bantuan yang diberikan tersebut KPM dapat membeli komoditas pangan sehingga mencukupi gizi dan pangan sehari-hari. Pada umumnya KPM memahami nilai dan jenis bantuan, namun sedikit KPM yang memahami kebebasan menentukan kuantitas dan kualitas komoditas pangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai permasalahan ketersediaan stok komoditas pangan yang tersedia di e-Warong pada saat bantuan sosial disalurkan, dimana yang terjadi setelah selesai penyaluran maka kegiatan transaksi di e-Warong pun praktis berhenti, kondisi ini mengganggu berjalannya program. Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan modal menjadi kendala bagi para agen penyalur e-warung, sebab rata-rata mereka adalah usaha kecil dengan modal yang sangat terbatas.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Program BPNT ini merupakan kebijakan distributif untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus sebagai kebijakan penanggulangan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Dengan demikian

evaluasi terhadap implementasi program ini menjadi penting, berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi dan peran pendamping TKSK dan pembina (Dinas Sosial Kabupaten/Kota) agar lebih peduli dan tanggap tentang kondisi, situasi, dan persoalan yang dihadapi para pengelola e-Warong dan KPM.
2. Meningkatkan pengetahuan e-Warong terkait pengelolaan dan proses bisnis yang baik, yaitu pengelolaan modal usaha, purchase order, pengembangan kemitraan dan hal operasional e-Warong lainnya.
3. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada KPM terkait proses transaksi non tunai, dan bahwa KPM diberikan kebebasan menentukan kuantitas dan kualitas komoditas pangan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatkan jenis komoditas pangan yang disalurkan sehingga tidak terbatas pada beras, telur dan daging saja akan tetapi bahan pokok lain seperti minyak goreng, mie instan dan tepung dll.
5. Menyusun dan mengkaji persebaran e-Warong yang ada, mengingat kondisi geografis masing-masing wilayah berbeda, sehingga KPM dapat mengakses e-Warong sedekat mungkin dengan tempat tinggalnya.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2019. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- — —. 2020. Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- Bappenas. 2017. Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi. Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Ishak Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastri. 2019. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)." *Social Work Journal* 9(2): 122-29.

Rachman, Benny Agustian, Adang Wahyudi. 2018. "Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)." *Analisis Kebijakan Pertanian* 16(1): 1-18.

Rezqyana Ayu Pertiwi, Raden Rara Aulia Qonita, Joko Sutrisno. 2019. "The Effectiveness of Rice for the Prosperous Population Program and Non-Cash Food Assistance (Case Study in Sikayu Village, Buayan Sub-District, Kebumen District)." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 34(2): 140-49. <https://jurnal.uns.ac.id/carakatani/article/view/27346>.

Sudiarso. 2012. "Kajian Efektivitas Program RASKIN Di Jawa Timur." *Pangan* Vol. 21(No. 1 Maret): 59-70.

World Health Organization. 2019. Investing in People: Sosial Protection for Indonesia's 2045 Vision. *Indonesia Economic Quarterly Report: Kuartal ketiga*.